

PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MODERAT

Mumtazul Imamah

Mumtazimamah@gmail.com

Muhammad Arif Syihabuddin

arifmuhammad599@gmail.com

Ahmad Ali Yenuri

aliyenuri@gmail.com

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Abstrak

Moderasi beragama telah menjadi salah satu arah kebijakan utama pendidikan nasional Indonesia sebagai respons atas menguatnya paham keagamaan eksklusif dan intoleran di sebagian lembaga pendidikan. Kurikulum sebagai jantung dari proses pendidikan memegang peran strategis dalam menanamkan cara pandang keislaman yang moderat (wasathiyah) sejak dini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep, landasan, dan prosedur pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat melalui pendekatan kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat perlu menempuh lima tahapan pokok, yaitu: (1) analisis kebutuhan dan konteks sosial-keagamaan; (2) perumusan tujuan dan kompetensi berbasis nilai moderasi; (3) pemilihan dan pengorganisasian materi ajar yang mengintegrasikan sembilan indikator moderasi beragama; (4) pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang dialogis-partisipatif; dan (5) evaluasi kurikulum yang berkelanjutan. Nilai-nilai moderasi yang perlu diintegrasikan meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan implementatif, seperti keterbatasan kompetensi pendidik, resistensi sebagian masyarakat, dan minimnya bahan ajar yang terintegrasi nilai moderasi, serta menawarkan strategi mengatasinya melalui penguatan pelatihan guru, kolaborasi lintas lembaga, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kata Kunci: pengembangan kurikulum; pendidikan Islam; moderasi beragama; Islam moderat; studi kepustakaan

Abstract

Religious moderation has become one of the main policy directions of Indonesian national education in response to the strengthening of exclusive and intolerant religious understanding in some educational institutions. The curriculum, as the heart of the educational process, holds a strategic role in instilling a moderate Islamic worldview (wasathiyah) from an early age. This study aims to describe the concept, foundation, and procedures for developing a moderate Islamic Education curriculum through a library research approach. Data were collected from

books, accredited scientific journal articles, and relevant official government policy documents, then analyzed using descriptive-qualitative content analysis techniques. The results show that the development of a moderate Islamic Education curriculum needs to go through five main stages: (1) analysis of needs and socio-religious context; (2) formulation of objectives and competencies based on moderation values; (3) selection and organization of teaching materials that integrate nine indicators of religious moderation; (4) development of dialogical-participatory learning strategies and methods; and (5) sustainable curriculum evaluation. The moderation values that need to be integrated include national commitment, tolerance, non-violence, and acceptance of local traditions. This study also identifies several implementation challenges, such as limited educator competence, resistance from some communities, and the scarcity of teaching materials integrated with moderation values, and offers strategies to overcome them through strengthening teacher training, cross-institutional collaboration, and the use of learning technology.

Keywords: curriculum development; Islamic education; religious moderation; moderate Islam; library research

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah menguatnya arus keberagaman yang cenderung eksklusif, rigid, dan pada titik tertentu mengarah pada sikap intoleran maupun ekstrem. Sejumlah kajian melaporkan bahwa benih-benih radikalisme keagamaan tidak jarang bersemai justru melalui jalur pendidikan, baik pada jenjang dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.¹ sehingga lembaga pendidikan Islam dituntut untuk hadir sebagai ruang penyemaian cara beragama yang damai, terbuka, dan moderat. Fenomena ini kemudian mendorong pemerintah, melalui Kementerian Agama, menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional yang diarusutamakan ke dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan.

Moderasi beragama (*wasathiyah al-islam*) pada dasarnya bukan konsep baru dalam khazanah Islam. Prinsip jalan tengah, keseimbangan antara ekstremitas berlebihan (*ifrath*) dan sikap meremehkan (*tafrith*), telah menjadi karakter dasar ajaran Islam sejak masa awal. Namun demikian, dalam konteks pendidikan formal, nilai moderasi tersebut perlu diterjemahkan secara sistematis ke dalam kurikulum agar dapat diinternalisasi peserta didik secara terencana, bukan sekadar slogan normatif.

Kurikulum menempati posisi sentral dalam proses pendidikan karena berfungsi sebagai rancangan pengalaman belajar yang mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran menuju

¹M. Kosim, I. Nasution, J. Anidar, M. Kustati, M. Ritonga, dan D. Perrodin, "Radikalisasi Di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 2 (2021): 282-296.

tujuan yang telah ditetapkan². Pengembangan kurikulum bukanlah aktivitas insidental, melainkan proses yang sistematis, berjenjang, dan melibatkan berbagai pertimbangan filosofis, psikologis, sosiologis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan karakteristik keilmuan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus terbuka terhadap konteks sosial-budaya yang terus berubah.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa kurikulum PAI di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, di antaranya orientasi pembelajaran yang lebih menekankan aspek kognitif dibanding penghayatan nilai, keterbatasan kompetensi pedagogik-religius guru, serta minimnya materi ajar yang secara eksplisit memuat nilai-nilai moderasi⁴. Di sisi lain, kajian mengenai internalisasi nilai moderasi beragama dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih bersifat parsial dan belum terstruktur dalam seluruh komponen kurikulum, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi⁵. Temuan lain memperlihatkan bahwa penguatan kurikulum berbasis moderasi menjadi salah satu strategi paling efektif untuk mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan⁶.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kebijakan moderasi beragama yang telah diurusutamakan secara nasional dengan praktik pengembangan kurikulum PAI yang masih berjalan secara konvensional di banyak satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus memetakan prosedur pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat secara sistematis, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga evaluasi, dengan berpijak pada teori-teori pengembangan kurikulum yang telah mapan maupun kebijakan moderasi beragama yang berlaku.

Urgensi kajian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia merupakan rumah bagi ribuan lembaga pendidikan Islam, mulai dari raudhatul athfal, madrasah, pesantren, hingga

²Z. Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Cet. I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

³A. Achruh, "Komponen dan Model Pengembangan Kurikulum," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.9933>.

⁴L. A. Wahid dan T. Hamami, "Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam dan Strategi Pengembangannya dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2021).

⁵D. Noviani dan E. Yanuarti, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam," *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 57-68.

⁶M. Kosim, I. Nasution, J. Anidar, M. Kustati, M. Ritonga, dan D. Perrodin, "Radikalisasi Di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 2 (2021): 282-296.

perguruan tinggi keagamaan Islam, yang secara agregat menaungi jutaan peserta didik. Skala yang begitu besar ini menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu simpul strategis dalam upaya penguatan moderasi beragama secara nasional. Apabila kurikulum yang diterapkan pada ribuan lembaga tersebut mampu secara konsisten menanamkan nilai-nilai moderasi sejak usia dini, maka dalam jangka panjang hal ini akan berkontribusi signifikan terhadap terciptanya kehidupan beragama yang harmonis dan terhindar dari ancaman disintegrasi sosial akibat ekstremisme maupun intoleransi. Sebaliknya, apabila pengembangan kurikulum tidak dilakukan secara sistematis dan hanya mengandalkan improvisasi masing-masing guru, maka penguatan moderasi beragama berpotensi berjalan tidak merata dan tidak berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang data-datanya diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek kajian, tanpa memerlukan riset lapangan⁷. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual-teoretis, yaitu memetakan konsep, landasan, dan prosedur pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat berdasarkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori. **Pertama**, sumber data primer yaitu artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional yang membahas secara langsung tema pengembangan kurikulum Pendidikan Islam, moderasi beragama, dan Islam moderat yang terbit dalam rentang tahun 2019-2024. **Kedua**, sumber data sekunder yaitu buku-buku teks kurikulum, dokumen kebijakan resmi seperti pedoman implementasi Kurikulum Merdeka⁸ dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam terbitan Kementerian Agama⁹, serta laporan dan hasil kajian lembaga yang relevan dengan topik penelitian.

⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁸Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

⁹Kementerian Agama RI, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kemenag RI, 2021).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, menghimpun, dan menyeleksi dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Sinta, Garuda, DOAJ, serta repositori jurnal masing-masing perguruan tinggi. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci "pengembangan kurikulum pendidikan Islam", "moderasi beragama", dan "Islam moderat".

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu memilah dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema (konsep kurikulum, landasan pengembangan, dan prosedur pengembangan); penyajian data secara sistematis dan naratif; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai sumber pustaka untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data. Melalui proses tersebut, kajian ini berupaya menyintesis berbagai pandangan menjadi sebuah kerangka prosedural yang koheren mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin *currere* yang berarti "berlari" atau "lintasan", yang kemudian dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Islam, kurikulum dimaknai lebih luas tidak hanya sebagai daftar mata pelajaran, tetapi sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang untuk membentuk kepribadian muslim yang seimbang antara dimensi keilmuan, spiritual, dan sosial.¹⁰ Kurikulum Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh sekaligus mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁰Nidawati, "Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.22373/jm.v11i1.8427>.

Tujuan Pendidikan Islam mencakup dimensi dunia dan akhirat secara seimbang, yakni membentuk pribadi yang berakhlak mulia, cakap secara intelektual, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas¹¹. Karena itu, kurikulum PAI harus dirancang secara komprehensif, mencakup dimensi akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah, dengan tetap memperhatikan tahap perkembangan psikologis peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum PAI di Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Agama, dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan agama yang memadai, sekaligus menanamkan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran sesuai konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk¹². Karakteristik kemajemukan inilah yang kemudian menuntut kurikulum PAI untuk tidak berhenti pada transfer pengetahuan keagamaan semata, melainkan juga menumbuhkan kesadaran hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.

Kurikulum PAI memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari kurikulum mata pelajaran umum. Pertama, kurikulum PAI bersifat teosentris, artinya seluruh materi ajar senantiasa dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (hablun min Allah) tanpa mengabaikan hubungan manusia dengan sesama (hablun min an-nas). Kedua, kurikulum PAI bersifat integratif, yaitu memadukan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran agama tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga terwujud dalam sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Ketiga, kurikulum PAI bersifat kontekstual, yaitu senantiasa terbuka untuk merespons dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang di masyarakat¹³. Ketiga karakteristik ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kurikulum Pendidikan Islam yang moderat, karena moderasi beragama pada dasarnya juga menuntut keseimbangan antara dimensi teosentris, integratif, dan kontekstual tersebut.

2. Konsep Moderasi Beragama dan Islam Moderat dalam Pendidikan

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang senantiasa mengambil posisi di tengah, bersikap adil, dan berimbang serta menghindari sikap berlebihan dalam praktik beragama, baik yang condong ke arah ekstrem kanan (radikal-

¹¹M. Mukhlis, A. Rasyidi, dan H. Husna, "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim," *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2024): 1-20.

¹²Kementerian Agama RI, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2021).

¹³Mahrus, "Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021).

konservatif) maupun ekstrem kiri (liberal-sekuler)¹⁴. Dalam kerangka kebijakan nasional, moderasi beragama diukur melalui empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini menjadi rujukan penting dalam merumuskan kompetensi dan materi kurikulum Pendidikan Islam yang moderat.

Islam moderat (wasathiyah al-islam) merujuk pada karakter dasar ajaran Islam yang menempatkan diri pada posisi pertengahan (tawassuth), berkeadilan (i'tidal), berimbang (tawazun), toleran (tasamuh), dan menghargai perbedaan pendapat (musawah). Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep normatif, melainkan perlu diinternalisasikan secara sistematis melalui proses pendidikan, khususnya melalui desain kurikulum yang secara sengaja mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran¹⁵. Internalisasi nilai-nilai Islam moderat sejak jenjang pendidikan dasar terbukti berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap keberagamaan peserta didik yang inklusif dan tidak mudah terpapar paham intoleran di kemudian hari.

Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa integrasi nilai moderasi beragama ke dalam Kurikulum Merdeka Belajar mata pelajaran PAI dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu integrasi pada capaian pembelajaran (CP) dan alur tujuan pembelajaran (ATP), integrasi pada materi ajar melalui pemilihan tema dan contoh kontekstual, serta integrasi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila¹⁶. Model integrasi semacam ini memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang kontekstual dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosial masing-masing.

3. Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Moderat

a. Landasan Filosofis.

Secara filosofis, pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat berpijak pada worldview Islam yang memandang manusia sebagai khalifah fil ardh yang harus mampu menjaga keseimbangan (tawazun) antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial, antara dimensi ukhrawi dan duniawi. Prinsip jalan tengah yang menjadi karakter dasar ajaran Islam inilah yang

¹⁴F. Khaswara, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Globalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia," Gunung Djati Conference Series 8 (2022): 283-293.

¹⁵M. Heriyudanta, "Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia," MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam 4, no. 2 (2023): 203-215, <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.7250>.

¹⁶D. Noviani dan E. Yanuarti, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam," Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2023): 57-68.

menjadi fondasi filosofis bagi seluruh komponen kurikulum, mulai dari perumusan tujuan hingga evaluasi.

b. Landasan Yuridis.

Secara yuridis, pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama tentang moderasi beragama, serta Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi¹⁷. Regulasi-regulasi tersebut menjadi payung hukum yang mengarahkan satuan pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah berbasis Islam, untuk mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum operasional masing-masing.

c. Landasan Sosiologis.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan suku, agama, ras, dan antargolongan yang tinggi. Kondisi sosiologis semacam ini menuntut kurikulum Pendidikan Islam untuk tidak dirancang secara eksklusif, melainkan responsif terhadap realitas kebinekaan, sehingga peserta didik terbiasa hidup berdampingan secara damai dengan kelompok yang berbeda keyakinan maupun latar belakang budaya¹⁸. Kajian mengenai perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia menegaskan bahwa faktor sosial-budaya senantiasa menjadi salah satu determinan utama dalam setiap perubahan kebijakan kurikulum nasional.

d. Landasan Psikologis.

Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik pada setiap jenjang, agar internalisasi nilai moderasi dapat berlangsung secara bertahap dan sesuai dengan kematangan berpikir peserta didik, bukan sekadar hafalan normatif yang tidak membekas pada sikap dan perilaku keseharian.

4. Model-Model Pengembangan Kurikulum sebagai Kerangka Acuan

Sebelum merumuskan prosedur pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat, penting untuk menelaah model-model pengembangan kurikulum yang telah mapan sebagai kerangka acuan. Model Ralph Tyler menekankan empat pertanyaan pokok dalam pengembangan kurikulum, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai, pengalaman belajar apa yang perlu disediakan, bagaimana pengalaman belajar tersebut diorganisasikan secara efektif, dan

¹⁷Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

¹⁸B. M. Marzuqi dan N. Ahid, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi," *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)* 4, no. 2 (2023): 99-116.

bagaimana menentukan tercapainya tujuan tersebut. Pendekatan Tyler bersifat linier dan menekankan pentingnya kejelasan tujuan sebagai titik tolak seluruh proses pengembangan kurikulum¹⁹, sehingga sangat relevan diadaptasi pada tahap perumusan tujuan dan kompetensi berbasis moderasi.

Berbeda dengan Tyler, model Hilda Taba menekankan pendekatan induktif (*grass-roots approach*), yaitu pengembangan kurikulum yang dimulai dari unit-unit pembelajaran yang dirancang oleh guru berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, kemudian disusun menjadi kerangka kurikulum yang lebih luas. Pendekatan ini relevan diterapkan pada tahap analisis kebutuhan dan pemilihan materi ajar kurikulum Pendidikan Islam moderat, karena memberi ruang bagi guru untuk mengenali secara langsung dinamika sosial-keagamaan yang dihadapi peserta didik di lapangan²⁰. Selain kedua model tersebut, model pengembangan kurikulum berbasis komponen turut menekankan pentingnya keterpaduan antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain²¹. Ketiga model ini menjadi rujukan utama dalam menyusun kerangka prosedural pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat yang ditawarkan pada bagian selanjutnya.

5. Prosedur Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Moderat

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai model pengembangan kurikulum yang telah mapan, seperti model Tyler, model Taba, serta pedoman pengembangan kurikulum PAI kontemporer, kajian ini merumuskan lima tahapan prosedural yang saling berkesinambungan dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Islam moderat, sebagaimana diuraikan berikut.

• Tahap Pertama: Analisis Kebutuhan dan Konteks Sosial-Keagamaan.

Tahap ini diawali dengan melakukan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) yang mencakup analisis kondisi sosial-keagamaan peserta didik dan masyarakat sekitar, tingkat kerawanan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan, serta harapan pemangku kepentingan (guru, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat) terhadap muatan moderasi dalam kurikulum. Analisis ini penting dilakukan mengingat karakter kurikulum harus kontekstual dan tidak dapat diseragamkan secara nasional tanpa memperhatikan kondisi lokal²². Hasil analisis kebutuhan

¹⁹Z. Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Cet. I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

²⁰S. Bahri, "Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (2017): 15-34, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>.

²¹A. Achruh, "Komponen dan Model Pengembangan Kurikulum," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.9933>.

²²Reza Nopriah Lubis, "Analisis Prinsip, Tantangan, dan Implikasi Pengembangan Kurikulum PAI untuk Pendidikan," *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023).

ini menjadi dasar penentuan skala prioritas nilai moderasi yang perlu ditekankan pada masing-masing satuan pendidikan.

- **Tahap Kedua: Perumusan Tujuan dan Kompetensi Berbasis Nilai Moderasi.**

Tujuan kurikulum dirumuskan dengan mengintegrasikan capaian pembelajaran keagamaan konvensional dengan kompetensi sikap moderat, yang mencakup kemampuan peserta didik untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif (kaffah), bersikap toleran terhadap perbedaan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta menghargai kearifan budaya lokal²³. Perumusan tujuan pada tahap ini idealnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para ahli kurikulum, pendidik, dan pemangku kebijakan agar tujuan yang dihasilkan realistis dan dapat diukur pencapaiannya.

- **Tahap Ketiga: Pemilihan dan Pengorganisasian Materi Ajar.**

Materi ajar dipilih dan diorganisasikan dengan mempertimbangkan tiga sumber utama, yaitu materi yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, materi yang bersumber dari fakta dan isu sosial-keagamaan kontemporer, serta materi yang bersumber dari kearifan lokal dan sejarah keislaman Nusantara yang secara historis menunjukkan karakter Islam yang damai dan akomodatif terhadap budaya setempat. Pengorganisasian materi dilakukan secara spiral, yaitu tema-tema moderasi diperkenalkan secara bertahap dari jenjang dasar hingga menengah dengan tingkat kedalaman yang terus meningkat, sehingga internalisasi nilai berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus antarjenjang.

- **Tahap Keempat: Pengembangan Strategi dan Metode Pembelajaran.**

Strategi pembelajaran yang relevan untuk menanamkan nilai moderasi antara lain metode dialogis, diskusi lintas perspektif, studi kasus kontekstual, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), serta pembiasaan (habitulasi) sikap toleran dalam interaksi sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan²⁴. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dinilai efektif karena memberi ruang bagi peserta didik untuk mengalami secara langsung praktik toleransi dan kerja sama lintas latar belakang, bukan sekadar menghafal konsep moderasi secara kognitif.

²³H. Ibda dan A. G. Wijanarjo, *Kurikulum Moderasi Beragama Berbasis Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2021).

²⁴Juhaeni, Nur Adillah, Wafda, dan Nadia Ulfah Sir, "Konsep Pengembangan Evaluasi Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53621/jider.v4i1.281>.

- **Tahap Kelima: Evaluasi Kurikulum secara Berkelanjutan.**

Evaluasi kurikulum dilakukan tidak hanya untuk mengukur ketercapaian aspek kognitif peserta didik, tetapi juga untuk menilai perubahan sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik dalam interaksi sosial sehari-hari. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui kombinasi asesmen formatif dan sumatif, observasi perilaku, serta umpan balik dari guru, orang tua, dan masyarakat, sebagai dasar penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan (continuous improvement)²⁵. Peran guru dalam tahap evaluasi ini sangat penting mengingat guru merupakan pihak yang paling memahami dinamika sikap keberagamaan peserta didik di lapangan.

6. Integrasi Nilai Moderasi dalam Komponen Kurikulum

Integrasi nilai moderasi beragama perlu dilakukan secara utuh pada seluruh komponen kurikulum, bukan hanya pada salah satu komponen saja. Pada komponen tujuan, nilai moderasi dirumuskan sebagai kompetensi sikap yang setara kedudukannya dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan keagamaan. Pada komponen isi/materi, nilai moderasi diintegrasikan melalui pemilihan tema, contoh, dan ilustrasi yang mencerminkan keberagaman dan toleransi. Pada komponen metode, nilai moderasi diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, bukan indoktrinatif. Sementara pada komponen evaluasi, nilai moderasi diukur melalui instrumen penilaian sikap yang valid dan reliabel, tidak sekadar tes tertulis berbasis hafalan²⁶. Model integrasi yang utuh pada keempat komponen tersebut memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Komponen Kurikulum	Wujud Integrasi Nilai Moderasi	Contoh Indikator
Tujuan/Kompetensi	Kompetensi sikap moderat sejajar dengan kompetensi pengetahuan	Toleran, cinta tanah air, anti kekerasan
Materi/Isi	Tema dan ilustrasi yang mencerminkan keberagaman	Kisah dakwah damai Wali Songo, kearifan lokal
Metode/Strategi	Pembelajaran dialogis dan berbasis proyek	Diskusi lintas perspektif, proyek kolaboratif

²⁵M. Judrah, A. Arjum, H. Haeruddin, dan M. Mustabsyirah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik: Upaya Penguatan Moral," *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 1 (2024): 25-37.

²⁶Nurdiyanto dan Muhajir, "Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam di Era Modern," *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri* 9, no. 1 (2024): 16-38.

Evaluasi	Instrumen penilaian sikap, bukan hanya tes kognitif	Observasi perilaku, jurnal refleksi peserta didik
----------	---	---

7. Studi Kasus Ilustratif: Praktik Baik di Madrasah dan Sekolah Islam

Sejumlah kajian kepustakaan mendokumentasikan praktik baik integrasi moderasi beragama pada satuan pendidikan Islam yang dapat dijadikan ilustrasi penerapan kerangka prosedural di atas. Pada jenjang madrasah berbasis pesantren, misalnya, penguatan kurikulum moderasi beragama dilakukan melalui pengembangan bahan ajar muatan lokal yang mengangkat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan sikap keberagamaan yang moderat dan akomodatif terhadap tradisi lokal²⁷. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak harus dipahami sebagai konsep asing yang diimpor dari luar, melainkan dapat digali dari tradisi keislaman Nusantara yang sejak lama telah mengedepankan sikap akomodatif dan toleran.

Pada jenjang madrasah laboratorium, penguatan kurikulum berbasis moderasi dilakukan melalui pengembangan modul pembelajaran tematik yang memadukan materi keagamaan dengan isu-isu kontemporer, seperti radikalisme, hoaks, dan intoleransi digital, sehingga peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai informasi keagamaan yang beredar di media sosial²⁸. Sementara pada jenjang sekolah umum berciri khas Islam, penguatan moderasi dilakukan melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang secara eksplisit mengangkat tema kebinekaan dan toleransi antarumat beragama, sejalan dengan semangat integrasi moderasi beragama pada Kurikulum Merdeka²⁹. Ketiga ilustrasi tersebut menegaskan bahwa prosedur pengembangan kurikulum yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya bersifat adaptif dan dapat diterapkan pada beragam tipologi satuan pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun sekolah umum berciri khas Islam.

8. Tantangan Implementasi dan Strategi Mengatasinya

Kajian kepustakaan yang telah ditelaah mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum Pendidikan Islam moderat.

²⁷H. Ibda dan A. G. Wijanarjo, *Kurikulum Moderasi Beragama Berbasis Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2021).

²⁸M. Kosim, I. Nasution, J. Anidar, M. Kustati, M. Ritonga, dan D. Perrodin, "Radikalisasi Di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 2 (2021): 282-296.

²⁹D. Noviani dan E. Yanuarti, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam," *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 57-68.

- **Pertama**, keterbatasan kompetensi pedagogik dan wawasan keagamaan moderat sebagian pendidik, sehingga penyampaian materi moderasi cenderung normatif dan kurang kontekstual³⁰.
- **Kedua**, resistensi sebagian masyarakat maupun pendidik yang memandang moderasi beragama sebagai upaya pendangkalan akidah, akibat kesalahpahaman terhadap konsep wasathiyyah itu sendiri.
- **Ketiga**, keterbatasan bahan ajar dan sarana prasarana pendukung pembelajaran berbasis moderasi³¹.
- **Keempat**, belum optimalnya kolaborasi antara satuan pendidikan, orang tua, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sejumlah strategi dapat ditempuh. Pertama, penguatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi moderasi beragama secara berkelanjutan agar guru memiliki wawasan keislaman yang komprehensif sekaligus keterampilan pedagogik yang relevan. Kedua, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai moderasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana penyampaian materi yang lebih interaktif dan kontekstual³². Ketiga, penguatan kolaborasi lintas lembaga antara satuan pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam merancang serta mengawal implementasi kurikulum moderasi beragama secara berkelanjutan. Keempat, penguatan komunikasi publik untuk meluruskan kesalahpahaman mengenai konsep moderasi beragama, sehingga dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini semakin kuat.

Selain tantangan yang bersumber dari internal satuan pendidikan, kajian ini juga mengidentifikasi tantangan eksternal yang tidak kalah signifikan, yaitu derasnya arus informasi keagamaan di ruang digital yang tidak jarang memuat narasi intoleran maupun menyesatkan. Peserta didik generasi digital native cenderung mengakses informasi keagamaan dari media sosial tanpa filter dan verifikasi yang memadai, sehingga rentan terpapar paham yang bertentangan dengan nilai moderasi yang diajarkan di sekolah. Kondisi ini menuntut kurikulum Pendidikan Islam moderat untuk secara eksplisit membekali peserta didik dengan kemampuan

³⁰Abdul Manan, "Pendidikan Islam dan Perkembangan Teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital," *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023).

³¹A. I. Sari dan R. Setyaningsih, "Islamic Education Curriculum Planning Model," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2023).

³²Abdul Manan, "Pendidikan Islam dan Perkembangan Teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital," *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023).

literasi digital dan literasi keagamaan kritis, agar mereka mampu menyaring dan mengevaluasi informasi keagamaan yang mereka terima secara mandiri.

Peran keluarga dan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan implementasi kurikulum Pendidikan Islam moderat. Nilai-nilai moderasi yang diajarkan di sekolah akan lebih mudah terinternalisasi apabila mendapat penguatan yang konsisten dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar peserta didik. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu membangun mekanisme komunikasi yang efektif dengan orang tua, misalnya melalui forum paguyuban wali murid berbasis moderasi beragama, agar nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah tidak mengalami kontradiksi dengan apa yang diterima peserta didik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

9. Peran Pendidik sebagai Agen Moderasi Beragama

Sebaik apa pun desain kurikulum yang dirumuskan di atas kertas, keberhasilannya pada akhirnya sangat bergantung pada peran guru sebagai pihak yang menerjemahkan dokumen kurikulum ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Guru Pendidikan Agama Islam memegang peran strategis dalam membangun karakter peserta didik, tidak hanya melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui keteladanan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai moderasi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan³³. Guru yang memiliki wawasan keislaman yang moderat, terbuka terhadap dialog, dan mampu mengelola perbedaan pandangan di dalam kelas secara bijaksana akan menjadi teladan hidup (*living curriculum*) bagi peserta didik, yang dampaknya seringkali lebih kuat dibandingkan materi ajar yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi kurikulum Pendidikan Islam moderat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain: pelatihan berkelanjutan mengenai wawasan keislaman moderat dan metodologi pembelajaran dialogis; pembentukan komunitas belajar profesional (*professional learning community*) antarguru PAI untuk saling berbagi praktik baik; pemberian kesempatan studi lanjut maupun sertifikasi kompetensi moderasi beragama; serta penyediaan sistem insentif dan penghargaan bagi guru yang menunjukkan komitmen tinggi dalam

³³M. Judrah, A. Arjum, H. Haeruddin, dan M. Mustabsyirah, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik: Upaya Penguatan Moral," *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 1 (2024): 25-37.

menanamkan nilai moderasi kepada peserta didik. Keempat strategi tersebut perlu dijalankan secara simultan dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial yang bersifat insidental.

10. Indikator Keberhasilan Kurikulum Pendidikan Islam Moderat

Untuk menilai keberhasilan implementasi kurikulum Pendidikan Islam moderat, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Berdasarkan sintesis terhadap kerangka moderasi beragama dan berbagai kajian yang telah ditelaah, kajian ini merumuskan sejumlah indikator keberhasilan pada tataran peserta didik, di antaranya: kemampuan memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual; kesediaan berinteraksi secara positif dengan teman yang berbeda keyakinan, suku, maupun latar belakang budaya; penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan ujaran kebencian atas nama agama; apresiasi terhadap tradisi dan kearifan budaya lokal sebagai bagian dari identitas keislaman yang berkarakter Nusantara; serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi keagamaan yang beredar di ruang digital.

Pada tataran kelembagaan, keberhasilan kurikulum Pendidikan Islam moderat juga dapat diukur melalui indikator seperti tersedianya dokumen kurikulum operasional yang secara eksplisit memuat capaian pembelajaran berbasis moderasi, terselenggaranya program penguatan kapasitas guru secara berkala, terjalinnya kemitraan aktif dengan orang tua dan tokoh masyarakat dalam mendukung penguatan moderasi beragama, serta terdokumentasikannya praktik-praktik baik pembelajaran berbasis moderasi yang dapat direplikasi oleh satuan pendidikan lain. Indikator-indikator tersebut sekaligus dapat menjadi instrumen evaluasi bagi satuan pendidikan dalam melakukan refleksi dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kurikulum Pendidikan Islam moderat merupakan kurikulum yang dirancang untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keislaman yang komprehensif sekaligus berkarakter toleran, cinta tanah air, anti kekerasan, dan menghargai kearifan lokal, sebagai wujud implementasi prinsip wasathiyyah dalam Islam. Kedua, pengembangan kurikulum tersebut berpijak pada empat landasan utama, yaitu landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis, yang secara bersama-sama membentuk arah dan batasan pengembangan kurikulum. Ketiga, prosedur pengembangan kurikulum Pendidikan Islam moderat dapat ditempuh melalui

lima tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu analisis kebutuhan dan konteks sosial-keagamaan, perumusan tujuan dan kompetensi berbasis nilai moderasi, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang dialogis-partisipatif, serta evaluasi kurikulum yang berkelanjutan.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah pentingnya bagi satuan pendidikan Islam, baik madrasah maupun sekolah, untuk tidak memandang moderasi beragama sebagai muatan tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruh yang menjiwai seluruh komponen kurikulum secara utuh. Penguatan kompetensi pendidik, penyediaan bahan ajar yang relevan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kurikulum Pendidikan Islam moderat di lapangan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat disarankan untuk menguji efektivitas kerangka prosedural yang ditawarkan dalam kajian ini.

Berdasarkan simpulan tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa hal. Bagi pengambil kebijakan di tingkat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, kerangka lima tahapan yang ditawarkan dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menyusun pedoman teknis pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan berbasis moderasi beragama. Bagi kepala satuan pendidikan dan tim pengembang kurikulum, disarankan untuk membentuk tim kerja lintas mata pelajaran guna memastikan integrasi nilai moderasi tidak hanya terjadi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga pada mata pelajaran lain yang relevan. Bagi pendidik, penguatan wawasan keislaman yang moderat dan keterampilan pembelajaran dialogis perlu terus diasah melalui pelatihan dan komunitas belajar profesional. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan guna menguji efektivitas kerangka prosedural ini terhadap perubahan sikap keberagamaan peserta didik secara empiris, baik melalui pendekatan studi kasus, penelitian tindakan kelas, maupun eksperimen kuasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achruh, A. "Komponen dan Model Pengembangan Kurikulum." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 1-9. <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.9933>.
- Arifin, Z. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Bahri, S. "Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (2017): 15-34. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>.

- Heriyudanta, M. "Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 203-215. <https://doi.org/10.21154/maalim.v4i2.7250>.
- Ibda, H., dan A. G. Wijanarjo. *Kurikulum Moderasi Beragama Berbasis Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2021.
- Juhaeni, Nur Adillah, Wafda, dan Nadia Ulfah Sir. "Konsep Pengembangan Evaluasi Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53621/jider.v4i1.281>.
- Judrah, M., A. Arjum, H. Haeruddin, dan M. Mustabsyirah. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik: Upaya Penguatan Moral." *Journal of Instructional and Development Researches* 4, no. 1 (2024): 25-37.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- Khaswara, F. "Moderasi Beragama dalam Bingkai Globalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 283-293.
- Kosim, M., I. Nasution, J. Anidar, M. Kustati, M. Ritonga, dan D. Perrodin. "Radikalisasi Di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 2 (2021): 282-296.
- Lubis, Reza Noprial. "Analisis Prinsip, Tantangan, dan Implikasi Pengembangan Kurikulum PAI untuk Pendidikan." *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023).
- Mahrus. "Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021).
- Manan, Abdul. "Pendidikan Islam dan Perkembangan Teknologi: Menggagas Harmoni dalam Era Digital." *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2023).
- Marzuqi, B. M., dan N. Ahid. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi." *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)* 4, no. 2 (2023): 99-116.
- Mukhlis, M., A. Rasyidi, dan H. Husna. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2024): 1-20.
- Nidawati, N. "Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam." *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2021): 22. <https://doi.org/10.22373/jm.v11i1.8427>.
- Noviani, D., dan E. Yanuarti. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam." *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 57-68.
- Nurdiyanto, dan Muhajir. "Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri* 9, no. 1 (2024): 16-38.

- Sari, A. I., dan R. Setyaningsih. "Islamic Education Curriculum Planning Model." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryaningrum, E., B. Muniroh, F. Gusnita, dan A. Lahmi. "Kurikulum Pendidikan Islam Modern." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 4, no. 3 (2024): 93-97. <https://doi.org/10.54297/seduj.v4i3.802>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, L. A., dan T. Hamami. "Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam dan Strategi Pengembangannya dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2021).
- Zainuri, Habib. "Blending Traditional and Modern Methods: A New Curriculum Framework for PAI." *Jurnal Al-Mau'izhoh* 6, no. 1 (2024).